

KOPERASI DESA DAN DANANTARA: INDUSTRIALISASI DESA DENGAN PERSPEKTIF “PRABOWONOMICS” DALAM ERA *ECONOMIC OF WAR*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi atau yang disebut dengan era kemenangan ideologi kapitalisme, perang menggunakan senjata militer telah menjadi salah satu instrumen yang ketinggalan jaman dalam pemenuhan kepentingan nasional. Hari ini, konsepsi tentang perang telah mengalami perluasan makna. Perang tidak hanya dipahami dalam bentuk konflik yang melibatkan senjata militer, tetapi juga dalam bentuknya yang lain, seperti menggunakan instrumen ekonomi, yang diistilahkan dengan “*war by other means*” atau perang dengan menggunakan instrumen lain (Blackwill & Harris, 2016). Salah satu bentuk perang dengan menggunakan instrumen ekonomi adalah perang dagang. Perang yang identik dengan tindakan balas-membalas dalam bidang perdagangan pada umumnya dipraktikkan oleh negara maju untuk melindungi industri domestiknya dari kompetisi yang berpihak pada industri asing (Arisanto & Wibowo, 2021).

Kondisi ini terjadi ketika kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menetapkan tarif timbal balik (*reciprocal tariff*) terhadap negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Tak sedikit yang merasakan dampak negatif dari perang dagang tersebut, karena mengganggu rantai pasokan global dalam perdagangan internasional (Scheipl, et al., 2020; Fetzer & Schwarz, 2020). Di sisi lain, masalah ekonomi merupakan masalah yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ekonomi dengan manusia hidup saling berdampingan. Segala kebutuhan manusia, baik sandang, pangan, dan papan, dapat terpenuhi melalui ekonomi (Setiyarini, 2014). Sehingga, akibat dari “*economic war*” yang dipicu oleh Trump, membuat Indonesia menjadi kritis dalam hal ekonomi.

Tak mengherankan jika akhirnya Indonesia mengharapkan untuk menghidupkan lagi ekonomi kerakyatan. Berangkat dari pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998, usaha kecil terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usaha. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan, di mana fungsi penyelamatan ini terbukti pada sektor penyediaan kebutuhan masyarakat melalui produksi dan normalisasi distribusi (Aditya & Yuniyanto, 2005).

Melalui berbagai dorongan, termasuk Great Institute yang melakukan FGD terkait “Prabowonomics”, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kemandirian bangsa yang dibangun melalui sektor pedesaan dengan koperasi sebagai tulang punggung utama. Dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia” mengungkapkan berbagai ketimpangan di Indonesia yang diukur dari rasio, baik persoalan tanah, aset, sumber daya, persoalan antar wilayah, antar sektor dan sebagainya. Kemudian, dalam buku tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan strategi transformasi bangsa dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada, seperti mementingkan kemandirian, ekonomi domestik, kemandirian pangan, di mana Asta Cita menjadi pegangan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Buku tersebut melahirkan apa yang dinamakan sebagai “Prabowonomics”, yaitu pemikiran yang berbasis pada “ekonomi Pancasila” yang diterjemahkan dalam berbagai pidatonya, bahwa Indonesia menginginkan kebangkitan industri dengan pertumbuhan 8%, serta gerakan *food security*, kedaulatan energi dan industrialisasi. Maka, “*economic of war*” atau perang tarif (*tariff war*) ini harusnya menjadi kesempatan yang diambil oleh Indonesia. Maka, kondisi ini disebut sebagai *blessing*, di mana Indonesia harus fokus kembali pada industrialisasi dengan membentuk Danantara (Daya Anagata Nusantara). Dari situ, diketahui

terdapat prinsip ekonomi dasar yang harus di jalankan oleh Indonesia dalam menghadapi “*economic of war*”, yaitu koperasi desa.

Ketika membahas “Prabowonomics” tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dari Prof Sumitro Joyo Hadi Kusumo, ayah dari Prabowo yang menjadi sahabat dekat dari Bung Hatta, yang ikut merintis koperasi di Indonesia pada masa lalu. “Prabowonomics”, secara sosialitik, harus diterjemahkan sebagai menggeser paradigma ekonomi neoliberal menjadi *welfare state*, yang mendahulukan ekonomi domestik, di mana wilayah pedesaan dialokasikan sebagai sumber daya yang vital dan membentuk struktur ekonomi, khususnya Koperasi Desa. Dengan demikian, Koperasi Desa yang didanai Danantara menjadi fokus pemikiran dalam “Prabowonomics” dalam menghadapi “*economic of war*”.

KOPERASI DESA

Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1, yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Aditya & Yuniyanto, 2005; Rahardjo, 2003), merupakan prinsip dasar dalam menyusun perekonomian Indonesia, di samping sektor BUMN dan swasta. Koperasi sendiri lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang pertama lahir di Inggris (1844) dan berusaha mengatasi berbagai masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya dikenal dengan “*Rochdale Principles*”. Waktu yang hampir bersamaan, di Perancis juga lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi, dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam (Masngudi, 1990).

Di Indonesia, karangan De Wolff van Westerrode yang dimuat dalam “*Tijdschrift voor Nijverheid en Handel*” (1896) telah menarik perhatian, yang isinya mengenai cara bekerja koperasi yang kemudian menjadi sebuah bank, yang diberi nama “*Poerwokertasche Hulp* “. Bank ini menjadi contoh pertama bagi *Volks credit bank* lainnya yang didirikan di seluruh Jawa dan Madura. Bank inilah yang memberikan kredit bagi petani dengan berdasarkan kedermawanan (Djojohadikoesoemo, 1941).

Pada waktu dijajah oleh Belanda dan Jepang, kondisi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Setelah kemerdekaan, Bung Hatta berusaha keras untuk membangun perekonomian rakyat, terutama melalui usaha koperasi di segala bidang yang kemudian direalisasikan sebagai upaya meningkatkan perekonomian rakyat yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Koperasi dipercaya oleh Bung Hatta sebagai soko guru perekonomian nasional atau sebagai tiang penyangga utama ketahanan ekonomi bangsa yang merdeka (Mubyanto, 1995).

Menurut Bung Hatta, koperasi mempunyai persamaan dengan sistem sosial asli yang berakar dari adat-istiadat bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia yang gemar tolong-menolong, sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong. Koperasi juga dapat mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama, dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Koperasi juga mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (*self help*). Semangat *self help* ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “*inferiority complex*” warisan dari kolonialisme. Koperasi juga bisa membangun ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Bagi Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya (Atmadi, 2004). Namun, karena tidak adanya dukungan dari masyarakat, ide Hatta mengalami kegagalan (Setiyarini, 2014).

Sekarang, muncul ide dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa

Koperasi Desa harus dibangun pada saat ini dan dalam kondisi “*economic of war*”. Hal ini mengingat banyak ketimpangan yang terjadi di Indonesia, dari fiskal, moneter, industri, ekspor-import dan juga sektor yang terkait dengan masyarakat akibat perdagangan dan politik luar negeri. Terkait dengan berbagai industri, dari *garment*, tekstile sampai pertanian, sangat terdampak dengan perdagangan luar negeri. Mengingat kondisi Indonesia yang krisis ekonomi, beberapa pekerjaan telah dilakukan, salah satunya adalah *food security* dengan pelaksanaan *integrated farming* dan telah membuka lahan baru seluas 500.000 ha di Merauke serta penguasaan kembali lahan-lahan sawit. Berikutnya adalah makan bergizi gratis dari pemerintah untuk berinvestasi pada “otak” manusia Indonesia dan memperkuat perekonomian di sektor pedesaan.

Di dalam Koperasi desa memiliki enam kegiatan utama, yaitu: 1) Peralatan Kantor Koperasi. Mengingat koperasi akan dibuat, maka semua peralatan kantor untuk koperasi harus ada, mulai kantor dan semua meja kursi serta perkakasnya; 2) Kegiatan Unit Simpan Pinjam. Untuk urusan simpan pinjam menjadi penting karena data menunjukkan bahwa masyarakat terjebak dalam kegiatan pinjam *online* (pinjol), termasuk praktik rentenir, dengan menggunakan suku bunga tinggi yang sulit dibayar. Simpan pinjam ini dilaksanakan oleh Koperasi Desa untuk mengurangi atau menghilangkan praktik pinjaman, baik secara *online*, rentenir, maupun praktik bunga yang mencekik rakyat; 3) Kegiatan Apotik Desa dan Klinik Desa. Harga obat bagi masyarakat dipedesaan tergolong tinggi, dengan adanya Apotik Desa bisa menyediakan obat-obatan yang terjangkau, minimal obat generik. Kemudian, Klinik Desa yang berada di Kelurahan, posisinya akan memperkuat Puskesmas di Kecamatan. Jika Puskesmas bersifat kuratif, Klinik Desa bersifat preventif; 4) Toko atau Pengadaan Sembako yang digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat desa sehari-hari. Hal ini sudah sangat jelas, bahwa nantinya Koperasi Desa tersebut harus memiliki toko yang menyediakan berbagai kebutuhan desa; 5) Pergudangan. Hal ini sangat penting mengingat perekonomian desa membutuhkan pergudangan bagi *input* yang terkait perikanan, perkebunan dan pertanian. Pergudangan ini juga dilengkapi dengan pupuk bersubsidi, menyalurkan benih, obat-obatan dan LPG. Serta, pergudangan tersebut harus menampung produk pertanian, jika dekat dengan pertanian yang dilengkapi dengan *dryer*, sedangkan yang dekat dengan perikanan dilengkapi dengan *food storage* dan sebagainya; Terakhir, 6) Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa masyarakat pedesaan harus memiliki truk. Truk-truk ini digunakan untuk mengangkut berbagai kebutuhan desa.

Di luar ke enam kegiatan utama dari koperasi desa, dapat melakukan kegiatan desa lainnya, seperti peternakan, migas, pertambangan, tetapi koperasi desa ini menjadi sebuah lembaga ekonomi. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan suatu badan usaha, melainkan badan hukum, sehingga BUMDes bersifat eksklusif yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Berbeda dengan koperasi yang menjadi milik seluruh warga desa, dan koperasi adalah badan usaha. Desa sendiri sampai sekarang tidak punya banyak badan usaha. Dari 10.000 BUMDes yang ada di Indonesia, hanya terdapat 300 BUMDes yang aktif, itu pun bergerak di sektor wisata. BUMDes kurang bisa merepresentasikan badan usaha yang ada di desa. Dengan adanya koperasi ini, desa memiliki lembaga ekonomi, dari aset-aset yang difasilitasi yang nantinya aset tersebut dikembangkan sehingga kemanfaatannya untuk desa tersebut. Serta, berbagai kegiatan desa yang lainnya, termasuk *food security*, kedaulatan energi dan industrialisasi merupakan perekonomian desa, harus selaras dengan tujuan dan arah gerak dari Koperasi Desa.

DANANTARA

Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah sebuah badan pengelola investasi nasional

yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Singkatnya, Danantara adalah lembaga yang mengelola dana investasi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia tengah memasuki era baru dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara, lembaga investasi nasional yang diharapkan menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Danantara dirancang untuk mengoptimalkan aset negara, mempercepat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global (Solihin, et al, 2025; Nasoha, 2025; Syahputra, 2025). Danantara dalam keuangan adalah level tertinggi atau SWF (*Sovereign Wealth Fund*). Hanya beberapa negara yang memilikinya dan sekarang Indonesia juga memiliki. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara bukan sekadar dana investasi, melainkan alat strategis untuk merombak sistem pengelolaan kekayaan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat (Ulya & Belarminus, 2025).

Namun, peluncuran Danantara menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para pakar ekonomi. Sebagian melihatnya sebagai langkah strategis sumber pendanaan pembangunan yang dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Gutomo, 2025). Sementara itu, sebagian lainnya memandangnya dengan pesimisme, mengkhawatirkan risiko intervensi politik, korupsi, dan ketidakefisienan pengelolaan, serta rekam jejak individu yang terlibat dalam pengelolaannya (Rizk, 2025).

Dari perspektif optimis, Danantara bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Baderi, 2025; Maszah, 2025). Dengan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan, lembaga ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif (Pamungkas, 2025). Keberhasilan model serupa di negara lain, seperti Temasek di Singapura (Christcentia, 2021; Ng, 2010; Ng, 2018), kemudian China Investment Corporation (Liew & He, 2012), atau Khazanah Nasional di Malaysia, menjadi referensi bahwa badan investasi negara mampu menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat mendukung pembiayaan proyek infrastruktur strategis (Miftahudin, 2025), mendorong penciptaan lapangan kerja (Jannah, 2025), serta mempercepat transformasi industri. Namun, di sisi lain, skeptisisme terhadap Danantara juga tidak dapat dikesampingkan. Salah satu kekhawatiran yang utama adalah potensi intervensi politik dalam pengelolaan dana investasi ini (Kholilullah, 2025). Sejarah menunjukkan bahwa banyak lembaga negara di Indonesia menghadapi tantangan tata kelola akibat tekanan politik dan praktik korupsi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penunjukan pengelola dan mekanisme investasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Danantara.

Untuk memastikan keberhasilan Danantara, langkah strategis yang perlu diterapkan (Solihin, et al, 2025) adalah: yang *pertama*, penerapan tata kelola yang baik atau *good governance* dengan transparansi penuh dalam pengelolaan aset dan investasi (Astuti, 2025). *Kedua*, memastikan bahwa Danantara harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan strategi investasi yang berkelanjutan (Brights, 2025). *Ketiga*, melibatkan publik dan akademisi dalam proses pengevaluasian agar ada mekanisme *check and balance* yang kuat (Setiawan, 2025).

PENGIMPLEMENTASIAN KOPERASI DESA DAN DANANTARA

Dalam membangun 80.000 Koperasi Desa yang bernama “Merah Putih” dengan anggaran pada tahun pertama sebesar Rp 400 triliun, di mana pada jamannya Adi Sasongko hanya mendapatkan Rp 6 triliun dan pada jamanya Soeharto, hanya diberikan 2% saham, tetapi tidak jadi karena konglomerat-konglomerat tidak mau, yang bertujuan untuk membangun

perekonomian desa, yaitu membangun distribusi, industrialisasi pedesaan dan lain-lain. Jika Koperasi membawa industrialisasi pedesaan, mengingat 80.000 dikalikan Rp 5 miliar adalah Rp 400 triliun, dan *multiple effect*-nya dikatakan tiga kali, menjadi Rp 1.200 triliun, dalam tiga tahun, harusnya sudah tidak menggunakan uang negara. Hal ini mengingat sudah ada Rp 3.600 triliun masuk ke desa. Artinya, Koperasi Desa sangat mungkin untuk dijalankan.

Selain koperasi, ada juga industrialisasi, perdagangan, dan teknologi. Jika melihat perjalanan ekonomi dunia dari tahun 1984, Iran diembargo Amerika Serikat, tetapi sekarang Iran menjadi negara yang sukses dalam membangun teknologi dan industrinya. Kemudian, jika melihat 10-20 tahun kebelakang di Indonesia, ada tahap industrialisasi dan lepas landas, tetapi kemudian masa transformasi yang menggambarkan “citra gado-gado” yang membuat Indonesia mengalami deindustrialisasi. Tidak ada negara yang ekonominya maju, jika tidak digerakkan oleh industrialisasi, contohnya Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang sudah lebih dulu, tetapi yang belakangan ada China. Maka, perlu adanya sinkronisasi antara industri dan perdagangan. Tidak ada satu pun negara yang maju, jika perdagangannya tidak diintegrasikan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Melihat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 280 juta, harusnya merupakan pasar yang besar. Pasar untuk industri tersier, sekunder dan primer, dapat bergerak dan mengisi semuanya. Jadi, tidak ada negara maju, tanpa membangun perdagangan dan industrinya, dan tidak ada industri dan perdagangan, yang dibangun tanpa mengetahui teknologinya. Pada jaman Presiden Soeharto dan Presiden Habibie sudah dibangun teknokrat dengan 10 industri strategis. Namun, kelemahannya tidak memiliki kemampuan komersialisasi yang terkait bagaimana memperdagangkan produk-produk yang dihasilkan. Jadi, penguasaan teknologi merupakan persoalan sangat penting. Maka, Indonesia harus menguasai teknologi, terkait dengan industrialisasi, produk, atau prosesnya. Teknologi tidak bisa dibangun jika tidak membangun SDM-nya. Penduduk Indonesia yang 280 juta bisa menjadi pasar dan menjadi penggerak pasar itu sendiri dalam lintasan industri perdagangan dan teknologi.

Fokus pada industrialisasi kembali, yang sudah 10 tahun ini ada deindustrialisasi yang terstruktur, dari industri *garment* dan *fashion*, dari 100% data yang diperoleh, sebesar 70% merupakan import dan 30% sisanya dalam negeri. Dari 70% yang import, 30% adalah legal dan 40% adalah ilegal. Jadi, jika Presiden Prabowo Subianto menginginkan bagaimana menyelesaikan *tariff war*, maka harus memverifikasi industri yang menghasilkan jutaan buruh menjadi tidak bekerja, seperti tahun 1998, jika melihat jauh lagi seperti tahun 1965, di mana kemiskinan itu di mana-mana dan terstruktur. Jadi, fokus di dalam negeri, bagaimana menyetop ilegal import, seperti Mangga Dua, yang mengimport ribuan kontainer tetapi semuanya ilegal.

Presiden Prabowo Subianto juga memikirkan sampai pada level pedesaan dan tidak memikirkan hanya level ekonomi tingkat tertinggi, tetapi juga membahas dan sudah serius serta akan diluncurkan terkait Koperasi. Ini semuanya sudah komprehensif, yang diharapkan memberi jawaban kepada masyarakat di pedesaan. Tetapi, secara *unpredictable*, mengapa Donald Trump memberikan kebijakan secara resiprokal dan dampaknya secara makro akan menjadi luar biasa, yang dimulai dari kebijakan resiprokal, perang tarif, *resiliation*, seperti yang dilakukan oleh China yang menantang Amerika Serikat sampai tarif berapa pun akan dilayani. Akhirnya, kondisi ini menyentuh Indonesia yang lebih kompromistis, di mana mengirimkan tim negosiasi ke Amerika Serikat dan pulang membawa beberapa hasil dari negosiasi tersebut, mulai dari keberatan penggunaan QRis sampai pembayaran nasional. Setelah dihitung, penggunaan QRis itu mengurangi hampir sekitar Rp 800 triliun-an, karena sudah sampai kaki lima, yang harusnya menggunakan Master dan Visa, serta kondisi ini mengurangi pendapatan Amerika Serikat sampai Rp 800-900 triliun. Mengenai produk halal,

juga dipermasalahkan Amerika Serikat, seperti bajakan klasik di Glodok dan ITC, Mangga Dua, bukan hanya Mangga Dua saja, itu hanya simbol. Lalu banyak masukan dari kalangan ahli dan profesor, salah satu dalam menghadapinya adalah diversifikasi pasar ekspor, mulai dari pasar yang potensial, penguatan kerjasama regional, beberapa ekspansi global, seperti ke Afrika dan lainnya yang belum digarap. Terus, Indonesia juga harus membuat produk-produk yang bisa dijual. Jadi ada produk "*Made In Indonesia*", tidak hanya di pusat saja, tetapi juga di daerah. Pengalaman Jepang, Toyota dulunya UKM, dari pemintalan benang tenun, menjadi industri otomotif terbesar di dunia. Sebenarnya, basis industrialisasi harus bergerak di sektor desa lebih dulu.

Dalam membangun industri, juga perlu merestrukturisasi untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas. Bagaimana memberdayakan terkait *resources* dalam teknologi, infrastruktur *financing*, dan SDM. Lalu, untuk daya saing dalam bidang proses, bagaimana meningkatkan kualitas kecepatannya. Kecepatan yang di-*handle* saat ini berbeda dengan jaman dulu. Sekarang sudah menitan dalam meng-*handle* kebutuhan *customer*. Bagaimana menyiapkan industri transportasi, permesinan, industri hulu, dari logam sampai kimia, dan yang paling penting, harus menguasai *high technology* melalui AI, Robot dan lain-lainnya.

Di sisi lain, pada masa Presiden Soeharto, industrialisasi menyumbang sampai 30%, dan pada masa Presiden Joko Widodo, industrialisasinya hanya 15%-16%, sekarang sudah naik lagi menjadi 18%. Termasuk pertanian, jika bicara industrialisasi, ada *on-farm* dan *off-farm*, tidak hanya fokus pada *manufacturing*, tetapi industri pertanian yang sifatnya budidaya skala massif.

Berbicara ketahanan energi selalu berputar-putar dengan energi fosil. Ketahanan energi itu merupakan *renewable energy*. Namanya fosil itu akan habis. Jadi, jika berbicara ketahanan energi harus menyiapkan *renewable energy*, dan bagaimana kebijakan terkait dengan ini harus jelas. Jika energi masih bergantung pada fosil, Indonesia tidak akan bisa bertahan dan di dalam konteks ketahanan energi tidak bisa seperti membalikkan tangan. Jadi, jika sepakat dengan *renewable energi*, tidak bisa langsung memberhentikan industri pertambangan. Semuanya itu strategis, tidak ada yang *instant*, tetapi harus dimulai dari sekarang.

Terkait dengan industri otomotif, Indonesia dengan Jepang memperbolehkan Jepang masuk sampai pada level komponennya. Jika Indonesia harus membangun komponen akan kalah dari Jepang. Akhirnya, Astra, *supplier*-nya yang harusnya dari Indonesia, tetapi *supplier*-nya dari industri-industri Jepang. Jika di *manufacturer*, pasar itu harus di dorong lebih dahulu, apalagi berbasis patriotisme. Misalnya Proton tidak menjadi kebanggaan di Malaysia jika pasarnya tidak didorong, sama dengan IPTN yang tidak memiliki pasar jika tidak didorong. Mau tidak mau, harus dipaksakan kepada rakyat untuk membeli. Tapi, jika mau berbasis pada perekonomian "*Prabowonomics*", maka ekonomi harusnya berputar di level bawah, di level desa. Koperasi Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto sudah ditunggu-tunggu, karena mandat dari Pemerintahan Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial, bukan hanya kesejahteraan sosial. Pada masa Presiden Soeharto adalah menciptakan kesejahteraan sosial, dan memang masalah keadilan sosial itu merupakan hal yang sulit.

Terkait dengan *food security*, kondisi ini adalah momentum dari bangsa pengimport menjadi bangsa pengeksport. Sebagai contoh, Jepang krisis beras, padahal Jepang penghasil pertanian nomer enam di dunia. Kemudian, Malaysia ingin mencontoh Indonesia yang baru merancang swasembada beras. Inilah momentum terkait keberpihakan pemerintah di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengharamkan import dan juga mengejar hilirisasi, karena hilirisasi di pertanian meningkatnya bisa 30 atau 50 kali lipat,

dari pada mengimport komoditas bahan mentah. Jika difokuskan, bisa mendapatkan sumber pendapatan alternatif dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan

Kebijakan tarif yang menekan perekonomian Indonesia jangan dilihat dari sisi negatifnya, ini bisa jadi *blessing*. Coba perhatikan negara-negara yang di sangsi sangat berat oleh Amerika Serikat, justru berubah menjadi negara-negara yang mandiri, minimal secara militer, seperti Korea Utara, Iran dan Russia. Sudah waktunya negara keluar dari kemandirian pasar yang ada sekarang. Kemudian, perlu dipertimbangkan secara komunal bahwa Donald Trump tidak suka negosiasi yang bersifat multilateral. Trump ingin *head-to-head*. Setiap negara akan ditekan satu-per-satu, bahkan sampai akar-akarnya. Belum tentu jika Indonesia memenuhi semua permintaannya, mulai dari QRIS sampai produk halal tersebut, Trump akan menurunkan tarif secara signifikan, bisa jadi Amerika Serikat akan tambah menekan aspek-aspek lainnya.

Terkait *food security*, kedaulatan energi dan industrialisasi di atas, lalu bagaimana dengan gambaran Danantara. Ada perkebunan kelapa sawit seluas 200.000 ha, tiba-tiba konglomerasi mengambil 500.000 ha. Sekarang sudah diambil semuanya oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, sudah lebih dari 1 juta ha berada di Danantara. Targetnya 2 juta ha masuk ke Danantara, maka Danantara tersebut bisa mendapatkan Rp 56 triliun secara *free* sebagai *cash flow*. Perumahan sebagai aset-aset BUMN, ribuan gedung tidak dipakai, lalu PT Pos yang ada di 450 titik dan gedungnya di tengah kota serta tidak dipakai lagi. Bagaimana konsolidasi ini dilakukan oleh Danantara secara optimal? Jiwa Danantara adalah keberanian solidaritas dan tekad bangsa. Jadi, negara melindungi masyarakat, dan negara hadir untuk masyarakat, ada kearifan lokal di dalam masyarakat, serta Koperasi Merah Putih sebagai kesejahteraan, kebijakan berkelanjutan, dan yang penting adalah keadilan. Di sini, terlihat bahwa masyarakat di bantu dengan subsidi, para warga negara kelas atas harus mau berbagi. Pertanyaannya, yang “tengah” biasanya adalah insentif dan insentif ini yang belum ada.

Ada dua pilar, *pertama* adalah bagaimana kesejahteraan umum bisa dicapai. Terkait dengan perumahan, masyarakat tidak bisa memiliki, tetapi bisa tinggal. *Kedua*, bagaimana *collecting* dan *safe garden*, kapitalisasi aset, APBN, dan Danantara. Pertanyaannya mengapa harus Danantara? Apakah deviden BUMN masuk ke BUMN tersebut? Lalu, deviden PNM (PT Permodalan Nasional Madani) adalah BUMN yang fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, terutama melalui pembiayaan mikro dan pendampingan. Deviden PNM ke GDP sebesar 0,5%, tetapi setiap tahunnya tidak ada konglomerat yang berinvestasi sebesar 1 miliar dollar, dan PNM-nya Indonesia Rp 30 triliun, artinya hanya ada konglomerat yang berinvestasi setengah triliun saja. Bandingkan dengan Asia Tenggara, Singapura 2,4%, Malaysia 1,2%, dan yang lainnya di atas 1% dan Indonesia hanya 0,2%.

Kedua, kinerja. Bagaimana feodalisme mengikis produktivitas. 82 dari 120 BUMN berkantor pusat di Jakarta. Lalu, apa logikanya Angkasa Pura 1 yang memiliki *airport* di Bali, Surabaya, Ambon, berkantor di Cengkareng? Logika apa yang membuat RNI atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sebuah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pangan dan juga memiliki berbagai bisnis lain, seperti agroindustri, industri gula, alat kesehatan, perdagangan, dan distribusi, pabriknya dan kebunnya berada di Jawa Timur. Mengapa RNI harus berkantor di Jakarta, dekat kekuasaan? Di Pertamina terdapat 40.000 pegawai, dan harusnya di pindah ke Balikpapan dekat IKN. Jika Pertamina pindah, maka Mobil Oil, Caltec, dan semua *supplier* akan pindah. Dengan demikian akan terjadi *clustering*, *interconnecting industry*. Jika membaca bukunya Michael Porter, itulah yang disebut dengan *clustering*. Jika ingat Texas, langsung ingat minyak. Kemudian, ada 82 BUMN di Jakarta, harus dipindahkan ke daerah dan menjadi ujung tombak pembangunan daerah, sehingga Jakarta tidak macet

lagi. Perintahkan direksi BUMN dan keluarganya pindah ke daerah. Jakarta akan hidup dan bisa membantu makan siang gratis. PT Pos juga dipindah ke daerah, jangan di tengah kota yang mahal sewanya. Sudah ada orang Indonesia yang menjalankan bisnis ini, namanya Lippo. Pemegang Saham, Direktur dan semua karyawannya dipindahkan ke Karawaci, jadilah Karawaci. Maka, seharusnya terdapat komitmen dan keberanian, serta Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan hal ini.

Ketiga adalah aset kekayaan negara yang *idle*. Bagaimana sawit dan timah dikelola oleh swasta, harusnya dikelola oleh negara. Maka, itu semua harus diambil oleh negara. Jika minyak import 800 ribu barrel per hari oleh swasta dan sudah selama 30 tahun ini negara hanya mendapatkan setengah dollar. Maka, jika import minyak diberikan kepada Danantara, Indonesia bisa mendapatkan 1 dollar sehari. Itu monopoli dan alasannya mengapa harus dikeluarkan oleh Danantara.

Presiden Soeharto pada tahun 1995 sudah mengatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus ikut globalisasi. Tapi globalisasi membawa efek yang berbeda, efek negatif karena *consumerism* berkembang. Contoh, bagaimana satu kampung di China menggunakan *jeans*, baju kotak-kotak dan topi, karena menonton televisi, padahal harusnya memakai celana pangsi. Inilah globalisasi yang membawa efek negatif. Hal ini terkait dengan Trilema Globalisasi yang mengatakan tiga hal. *Pertama*, sentralisasi ekonomi dalam globalisasi. *Kedua*, kedaulatan nasional dan *ketiga* adalah demokrasi politik. Maka, negara harus memilih dua dari tiga hal tersebut. Mana yang akan dipilih, mengorbankan demokrasi politik, mengorbankan globalisasi, tetapi yang negara pilih biasanya adalah mengorbankan kedaulatan nasional. Maka, diperlukan satu lembaga yang bisa memitigasi semua. Lembaga ini harus berfungsi sebagai lembaga fiskal, investasi dan distribusi kesejahteraan, itulah yang disebut Danantara. Danantara merupakan lembaga ekonomi hibrida yang pada dasarnya bicara mengenai fiskal, investasi dan kesejahteraan. Fiskal bicara *non-budgeter* pelengkap APBN mengkonsolidasi dan mengumpulkan aset negara yang *idle* dan BUMN. Sumber dananya deviden, privatisasi, nasionalisasi aset, kontribusi konglomerat, sampai sitaan aset. *Kedua*, optimalisasi investasi dan yang *ketiga* adalah distribusi kesejahteraan. Akhirnya, hak rakyat akan kembali ke rakyat secara adil. Jadi Danantara merupakan penghubung antara aset negara dan hak rakyat.

Lalu, Danantara itu lembaga apa? Di tahun *pertama*, menjadi lembaga kordinasi dan mobilisasi Asia Tenggara. *Kedua*, menjadi *holding company*, yang mengoptimalisasi nilai, privatisasi strategis. Bagaimana kelapa sawit, timah, sampai minyak harus menghasilkan Rp 1.000 triliun per tahun. Pada saatnya, lembaga ini menjadi *Sovereign Wealth Fund* (SWF), karena konsep SWF adalah dana sisa negara diinvestasikan kembali untuk masyarakat dalam jangka panjang. Terkait dana pensiun, yang belum masuk ke Danantara, ada sekitar 140 juta tenaga kerja di Indonesia, dan hanya 50 juta yang bekerja formal, 80 lebih juta sisanya adalah pekerja mandiri dan non-formal, seperti *accountant*, *lawyer*, dokter, dan masyarakat, yang tidak punya dana pensiun. Tukang gojek dan tukang becak tidak punya dana pensiun. Jika 83 juta ini bisa dibayar dalam waktu seminggu Rp 5.000 atau Rp 10.000 dalam waktu 10 tahun, bisa diambil sebanyak Rp 50-100 juta dan dengan jumlah tersebut bisa dijadikan sebagai modal kerja. Maka, diperlukan penjamin dana pensiun, itulah fungsi utama dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang nantinya seperti di Norwegia dan Amerika Serikat. Jika hal tersebut bisa dijalankan, Danantara bisa menjadi SWF dalam waktu 4-5 tahun sudah bisa menjadi arsitek institusional kesejahteraan di masa depan yang menghubungkan dana negara kepada rakyat secara langsung. Kuncinya, Danantara juga harus membawa koperasi, supaya dampaknya jelas, kedaulatan fiskal meningkat, kekuatan ekosistem, dan ekosistem meningkat berbasis aset kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 Th 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga, tiga lembaga pemerintah non-departemen (badan), gubernur dan seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Setelah itu, dikeluarkan lagi Satuan Tugas Implementasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa. Pada tanggal 12 Juli 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto menginginkan legalitas untuk Koperasi Desa bisa terbentuk. Meskipun hal ini merupakan program *top down* dari pemerintah, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dari koperasi yang harus bersifat *bottom up*. Jadi, mekanismenya melalui musyawarah khusus terkait agenda untuk pembentukan Koperasi Desa dan posisi Kepala Desa dibatasi melalui petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Koperasi, dan hanya menjadi pengawas, sedangkan peserta desa merupakan unsur-unsur terbaik di masyarakat. Pendekatannya, jika di desa belum ada koperasi, lalu dibentuk koperasi yang baru. Jika sudah ada koperasi, dilihat dulu, sudah maju atau hanya “papan nama”, maka pendekatan kedua adalah revitalisasi. Lalu, pendekatan ketiga adalah menggabungkan, jika BUMDes, KUB (Kelompok Usaha Bersama), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang mau bertransformasi jadi koperasi.

Tahap berikutnya, setelah tahap legalitas diselesaikan, tahap paling penting adalah tahap operasionalisasi. Uang akan diturunkan untuk Koperasi Desa. Operasionalisasi ini akan dilihat selama satu sampai dua tahun, lalu akan evaluasi kebermanfaatannya. Kondisi seperti ini sudah dirindukan oleh masyarakat desa. Mereka rindu kepada negara untuk ikut lagi memberikan sumber daya, baik kebijakan maupun uang dan diberikan ke masyarakat. Ada pun yang hadir sekarang adalah aktor-aktor non-negara, *meddle man*, tengkulak, dan segala macam yang mengatur sistem ekonomi desa.

Pemerintah, terutama dari Kementerian Koperasi yang mendapatkan amanat untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa, dengan dana Rp 400 triliun, di mana per desa akan mendapatkan Rp 5 miliar. Harapannya, dari Rp 400 triliun tersebut diputar dan meningkat menjadi 1.000 triliun. Tetapi, di tengah muncul pesimisme tentang SDM yang mumpuni, jika dikerjakan secara bersama-sama, akan mendapatkan SDM yang baik, cocok di bidangnya dan dapat dikejar. Bagaimana koperasi dulu dan koperasi kini, maka bisa dilakukan mitigasi resiko, penjaminan kredit atau asuransi, dan penggunaan teknologi yang akhirnya berharap Koperasi Desa menjadi ideal.

KESIMPULAN

Program Danantara sudah bagus, tetapi untuk dana pensiun belum ada dalam rencananya. Maka, perlunya pendanaan pensiun dari LPS seperti di Norwegia dan Amerika Serikat. Terkait dengan industri, perlunya ditinjau industri-industri yang sudah tutup dan nantinya diintegrasikan dengan Koperasi Desa untuk membangun industri dengan produk “*made in Indonesia*”. Sedangkan terkait dengan industri energi, Pemerintah perlu membangun berbagai industri terbarukan (*renewable industry*) menuju kemandirian energi, dan juga bisa diintegrasikan dengan industri lainnya, seperti listrik bahkan sampai mobil. Sedangkan *food security* telah dilakukan, namun demikian pemerintah harus mengurangi import serta berintegrasi dengan industri lainnya. Terkait dengan teknologi, pemerintah harus fokus dalam hal ini dan bekerjasama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Indonesia), Universitas atau pun Lembaga Riset untuk menemukan teknologi baru atau teknologi yang terkait dengan berbagai industri. Kemudian, terkait dengan Koperasi Desa agar dijalankan sesuai dengan mekanismenya serta berintegrasi dengan industri-industri di Indonesia dan industri strategis. Kondisi ini jika bisa dilakukan akan membuat ketahanan ekonomi bangsa. Di sisi lain, program Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Koperasi Desa dan Danantara

sudah lengkap, namun belum disosialisasikan secara holistik. Jika program Koperasi Desa dan Danantara telah disosialisasikan, maka kalangan akademisi dan lembaga riset dapat mendiskusikannya dan ikut serta mensosialisasikan, serta ikut mengevaluasi ketika program tersebut dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N., & Yuniyanto, S.B.T. (2016). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA. *Jurnal Candi*, 13(1), 53-71.
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa, A. (2021). Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163-183. DOI: 10.32787/ijir.v5i2.222
- Astuti, E. S. (2025). *Indef Danantara Bagaimana Dan Untuk Siapa? Esther Sri Astuti Direktur Eksekutif INDEF*. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Esther-Sri-Astuti-DANANTARA.pdf>
- Atmadi, T. (2004). *Demokrasi Kita: Idealisme dan Realitas Serta Unsur Yang Memperkuatnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Baderi, F. (2025, February 24). *Danantara Jadi Pilar Penting Perekonomian Nasional*. Website. <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/215024/danantara-jadi-pilar-pentingperekonomian-Nasional>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. *Belknap Press of Harvard University Press*. <https://doi.org/10.4159/9780674545960>
- Brights. (2025, February 19). *Danantara Indonesia, Raksasa Investasi Baru! Apa Dampaknya bagi Ekonomi dan Pasar Modal?* Website. <https://www.brights.id/id/blog/danantara-indonesia-raksasa-investasi-baru-apa-dampaknya-bagi-ekonomi-dan-pasar-modal>
- Christcentia, C. V. (2021). *Investasi Temasek Holdings Singapura dan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia (2015-2019)* [Universitas Katolik Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13538>
- Djojohadikoesoemo, M. (1941). *Sepoeloeh Tahoen Penerangan Tentang Koperasi Oleh Pemerintah 1930-1940*. Batavia: Balai Poestaka.
- Fetzer, T., & Schwarz, C. (2020). Tariffs And Politics: Evidence From Trump's Trade Wars. *The Economic Journal*, 131(May), 1717-1741 DOI: 10.1093/ej/ueaa122
- Gutomo, T. (2025, February 24). *Welcome Danantara: Indonesia Kini Punya "Temasek."* *Harian Disway*, 1. https://cms.disway.id/uploads/bank_img/HARIAN_DISWAY_24_FEBRUARI_2025.pdf
- Jannah, M. A. (2025, February 27). *Investasi Danantara Sebagai Solusi Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan di Indonesia*. Website. <https://energika.id/detail/72196/investasi-danantara-sebagai-solusi-penciptaan-lapangan-kerja-berkelanjutan-di-indonesia>
- Kholilullah, W. (2025, February 25). *Danantara dan Tantangan Intervensi Politik: Mampukah Meniru Temasek?* Website. <https://kumparan.com/musywil-xiii-wil-surabaya/danantara-dantantangan-intervensi-politik-mampukah-meniru-temasek-24Yg6QqRfZ>
- Liew, L. H., & He, L. (2012). Operating in an inharmonious world: China Investment Corporation. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 17(2), 253-267. <https://doi.org/10.1080/13547860.2012.668027>
- Masngudi. (1990). *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.

- Maszah, S. (2025, February 25). *Danantara: Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Indonesia*. Website. <https://kumparan.com/syaefmz/danantara-pilar-baru-kemandirian-ekonomiindonesia-24ZFkLZLHr0>
- Miftahudin, H. (2025, February 24). *Asosiasi Logistik Yakin Danantara Bisa Dorong Kemajuan Infrastruktur*. Website. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9xpm-asosiasi-logistikyakin-danantara-bisa-dorong-kemajuan-infrastruktur>
- Mubyanto. (1995). *Bung Hatta Dan Perekonomian Rakyat dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nasoha, A. M. M. (2025, February 26). *DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi*. Website. <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasistrategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>
- Ng, W. (2010). The evolution of sovereign wealth funds: Singapore's Temasek holdings. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18(1), 6–14. <https://doi.org/10.1108/13581981011019589>
- Ng, W. J. N. (2018). Comparative Corporate Governance: Why Singapore's Temasek Model Is Not Replicable In China. *International Legal Studies*, 51(211). <https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/01/NYI105.pdf>
- Pamungkas, H. (2025, February 24). *Strategi Baru Pemerintah Kelola Aset Nasional, Danantara Segera Beroperasi*. Website. <https://wahananews.co/ekuin/strategi-baru-pemerintah-kelolaaset-nasional-danantara-segera-beroperasi-E3f4zj7arG/0>
- Rahardjo, D. (2003). *"Apa Kabar Koperasi Indonesia"*, dalam *Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Scheipl, T., Bobek, V., & Horvat, T. (2020). Trade War between the USA and China: Impact on an Austrian Company in the Steel Sector. *Naše Gospodarstvo/Our Economy*, 66(1), 39–51. <https://doi.org/10.2478/ngoe-2020-0004>
- Setiyarini, H. (2014). Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3) 212-223.
- Setiawan, J. H. (2025, March 3). *Menakar Danantara: Antara Potensi dan Ancaman Korupsi*. Website. <https://kumparan.com/haryo-dolot/menakar-danantara-antara-potensi-danancaman-korupsi-24bRAr1PVAG>
- Syahputra, D. (2025, February 23). *Peresmian Danantara Mampu Tingkatkan Efisiensi Investasi Nasional*. Website. <https://mediadayak.id/peresmian-danantara-mampu-tingkatkan-efisiensi>
- Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). Danantara: Pilar Ekonomi Atau Beban Negara? *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 12(1), 225-235.
- Rizk, M. J. (2025, February 24). *Pengawasan dan Tata Kelola Danantara Harus Lepas dari Intervensi Politik*. Website. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengawasan-dan-tatakelola-danantara-harus-lepas-dari-intervensi-politik-lt67bc420639885/>
- Ulya, F. N., & Belarminus, R. (2025, February 24). *Prabowo: Danantara Bukan Sekadar Badan Pengelola Investasi*. Website. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/24/11083171/prabowo-danantara-bukansekadar-badan-pengelola-investasi>